

KETIMPANGAN HUBUNGAN INDONESIA-MESIR 1950-2010: KAJIAN TENTANG TEORI RESIPROSITAS

Abdurrahman Mohammad Fachir
Program Studi Agama dan Lintas Budaya
Minat Kajian Timur Tengah Sekolah Pascasarjana UGM
fachir@hotmail.com

Irwan Abdullah
Fakultas Ilmu Budaya UGM

Sangidu
Fakultas Ilmu Budaya UGM

Siti Mutiah Setiawati
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM

Abstract

Egypt was the first country in the world that recognized the independence of Indonesia. Egypt is also the first country signing a friendship agreement with Indonesia, which was followed by the opening of representative offices in Cairo and in Jakarta in 1950/1951. More than that, Egypt is the country where Indonesia children studying since before the 19th century to the present. Historical and emotional Indonesia-Egypt relations should be an important asset for both countries to improve more strategic relations and cooperation, so it becomes more meaningful each other. However, the opposite happened. Indonesia has always looked at the importance of Egypt, but Egypt only one eye sees Indonesia. Unequal, unbalanced and biased relationship reflected from two things, namely the formation of representatives and officials visit the country.

This dissertation research aims to answer the question why the relationship between Indonesia and Egypt from 1950 to 2010 is unequal, unbalanced and biased, and what efforts are offered to improve the relationship between Indonesia and Egypt so that Indonesia has interesting bargaining power, so that Indonesia is considered important by Egypt. Hopefully, this research has benefits for the development of International Relations and Middle East Studies as well as to provide input to the Government of Indonesia in making decision related to foreign policy towards Egypt and generate the basis for the implementation of Indonesia's foreign relations in the future, especially between Indonesia and Egypt.

Key words: Reciprocity, International relation and National Interest

ملخص

مصر هي أول دولة في العالم اعترفت استقلال جمهورية إندونيسيا، وهي أيضا أول دولة أبرمت اتفاقية الصداقة مع إندونيسيا التي لحقتها فتح سفارة الدولتين في القاهرة وجاكرتا عام 1951/1950، بالإضافة إلى أن مصر قبلة العلم التي كان الطلاب والطالبات من إندونيسيا يدرسون فيها منذ القرن التاسع عشر إلى الآن. العلاقة التاريخية - بل العاطفية - بين إندونيسيا ومصر ينبغي أن تكون في مكانة من الأهمية لتنمية العلاقة والتعاون بين

الدولتين إلى مستوى أكثر استراتيجيا وفعالا، وحتى تقوما بمبدأ تبادل الاحترام بينهما، إلا أن الواقع عكس ذلك. فقد نظرت إندونيسيا من جهة أهمية مصر عندها، ولم تنظر مصر النظر ذاته. هذا النظر الأعرج والمقعد بين الدولتين يتمثل على الأقل في أمرين: بنية الهيئة السفارية وزيارات المسؤولين في الدولة. يهدف هذا البحث إلى إجابة الأسئلة لماذا استمرت هذه العلاقة العرجاء بين إندونيسيا ومصر في فترة ما بين عام 1950 حتى 2010؟ وما هي الجهود المبذولة لإصلاح هذه العلاقة حتى تملك إندونيسيا القدرة على المساواة أمام مصر، وحتى تنظر مصر أن إندونيسيا في مكانة من الأهمية. ويرجى أن يكون هذا البحث نافعا في تطوير علم العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط، ووضع المقترحات أمام الحكومة الإندونيسية لاتخاذ السياسات الخارجية المناسبة تجاه مصر، وإيجاد القاعدة في تنفيذ العلاقة الخارجية في المستقبل، خاصة بين إندونيسيا و مصر.

الكلمات الدلالية: التبادل، العلاقات الدولية، المصلحة الوطنية.

A. Pengantar

Perasaan saling membutuhkan adalah unsur utama yang melandasi terjadinya hubungan antar negara, ungkap Mochtar Kusumaatmadja (1982:12), seorang Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Padjajaran Bandung, sekaligus Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tahun 1978-1988. Hubungan perdagangan antar negara misalnya, tercipta lantaran adanya kebutuhan pembagian kekayaan alam dan realitas perkembangan industri yang tidak merata di dunia, sehingga antar negara-negara di dunia menjalin hubungan dengan cara mempertukarkan hasil bumi dengan hasil industri. Selain di bidang perdagangan, saling membutuhkan juga terjadi di bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial dan olah raga. Untuk memformalkan hubungan saling membutuhkan itulah kedua negara membuka hubungan diplomatik.

Landasan ini pulalah yang melatar belakangi hubungan antara Indonesia dan Mesir. Sejak Indonesia membuka perwakilan di Kairo pada tahun 1950 dan Mesir membuka perwakilan di Jakarta pada tahun 1951, hubungan kedua negara sampai tahun 2010 terlihat erat, harmonis,

tidak ada ketegangan apalagi pemutusan hubungan diplomatik. Selama 50 tahun hubungan, Indonesia tidak pernah ‘mem-persona non grata-kan’ pejabat diplomatik Mesir dan juga sebaliknya, Mesir tidak pernah mendeportasi pejabat diplomatik Indonesia dari Mesir.

Akan tetapi, di balik keharmonisan tersebut, menurut hemat peneliti, sebenarnya terdapat ketimpangan, ketidakseimbangan dan kepincangan. Indonesia selalu memandang penting Mesir, sebaliknya Mesir hanya memandang sebelah mata Indonesia. Situasi inilah yang tidak banyak dirasakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia, bahkan para pemerhati politik luar negeri di kedua Negara. Realitas inilah yang menggerakkan hati peneliti untuk mengangkat fenomena tersebut dalam sebuah penelitian ilmiah.

Singkatnya, ketimpangan hubungan Indonesia-Mesir bisa dilihat dari 2 aspek. Pertama kuantitas formasi perwakilan dan yang kedua intensitas kunjungan pejabat negara. Jika Indonesia menempatkan banyak diplomat di KBRI Kairo, berbeda halnya dengan Mesir, yang hanya menempatkan beberapa diplomat di Kedutaan mereka di Indonesia. Frekuensi

kunjungan kepala negara dan pejabat-pejabat lain, juga bisa digunakan sebagai indikator keharmonisan kerjasama antar dua negara.

Kenyataan ini sebagai modal dasar untuk membuktikan bahwa hubungan Indonesia-Mesir yang berlangsung selama ini tidak seimbang dan berat sebelah. Indonesia terlalu memandang penting Mesir namun tidak sebaliknya. Bertolak dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir sehingga Indonesia memandang penting Mesir, dan bagaimana politik luar negeri Mesir terhadap Indonesia sehingga Mesir tidak memperhitungkan posisi Indonesia?
2. Faktor-faktor apakah yang mendasari ketimpangan hubungan Indonesia-Mesir?
3. Usaha-usaha apakah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki hubungan Indonesia-Mesir, agar ke depan Indonesia memiliki daya tawar yang menarik, sehingga dapat merubah paradigma hubungan kedua negara?

B. Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Resiprositas (*theory of reciprocity*). Menurut Robert O. Keohane (1986:3), resiprositas adalah terma yang ambigu karena muncul di banyak literatur yang berbeda dan masing-masing bidang pemikiran mendefinisikan resiprositas sesuai dengan tujuan teorinya. Resiprositas juga sering digunakan di bidang psikologi sosial, matematika, antropologi budaya dan sosiologi. Jadi, hubungan internasional bukanlah satu-satunya disiplin ilmu yang menggunakan istilah resiprositas.

Resiprositas merupakan bahasa Latin dari kata "*reciprocus*" yang tersusun dari kata retro+procus, yang artinya memberi dan menerima. Dalam istilah lain,

arti yang pokok adalah saling tukar, *mutual exchange* (Bruni, 2008:1). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, bentuk kata sifat dari resiprositas adalah resiprokal yang berarti saling berbalasan. Ini adalah hukum sebab dan akibat. Dalam Kamus Oxford, resiprositas diartikan sebagai; "*the principle that one will treat someone in a particular way if one is so treated by them*" (Martin, 2002:40). Sedangkan dalam kamus hukum yang ditulis oleh PH Collin, resiprositas juga dapat berarti: "*an arrangement which applies from one party to another and vice versa*" (Collin, 2004:249) Jadi, resiprositas adalah sebuah strategi pembalasan, yaitu kebaikan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan dibalas dengan kejahatan (*tit for tat strategy*).

Resiprositas mengandung dua makna: kontingensi dan ekuivalensi. Kontingensi artinya keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan, yang akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa pada masa yang akan datang. Maksudnya, bahwa resiprositas menunjukkan aksi 'tergantung' pada reaksi yang bermanfaat dari orang lain dan yang berhenti ketika reaksi yang diharapkan tidak datang. Perilaku resiprokal membalas keburukan terhadap aksi yang buruk atau membalas kebaikan terhadap aksi yang baik. Orang akan tersenyum jika ia diberi senyuman, sebaliknya ia akan berbohong jika dikhianati (Keohane, 1986:5-6).

Sementara makna ekuivalensi adalah keadaan sebanding dan sepadan. Namun bukan berarti dipahami secara ketat harus sepadan atau sebanding untungnyanya. Ekuivalensi bisa terjadi di antara pihak-pihak yang posisinya sederajat dan juga bisa terjadi di antara pihak-pihak yang tidak sederajat.

Teori resiprositas peneliti anggap adalah teori yang paling sesuai untuk melihat fenomena hubungan antara Indonesia dan Mesir. Sebab penggunaan parameter kontingensi dan ekuivalensi, kita bisa melihat dan merasakan secara

langsung realitas ketimpangan tersebut benar-benar ada.

Tentunya, selain membuktikan wujud ketimpangan, peneliti juga akan mendeskripsikan mengapa ketimpangan hubungan dua negara bisa terjadi? Untuk menjawab pertanyaan itulah, peneliti memulai pembahasan penelitian ini dengan mengangkat sejarah hubungan diplomatik Indonesia Mesir, yang diikuti pembahasan terkait aplikasi politik dalam dan luar negeri kedua negara. Tujuan pembahasan tema tersebut adalah untuk menjelaskan kondisi dua negara, sehingga bisa dipahami kemudian mengapa kontigensi dan ekuivalensi dalam hubungan kedua negara belum bisa tercapai.

C. Pembahasan

Kompleksitas situasi dan kondisi yang melatar belakangi hubungan Indonesia Mesir adalah penyebab utama mengapa ketimpangan hubungan kedua negara terjadi. Untuk memudahkan pembaca memahami permasalahan tersebut, peneliti akan memulai pembahasan disertai dengan menjelaskan sejarah lahirnya hubungan diplomatik antara Indonesia Mesir. Pembahasan ini dianggap penting, mengingat tanpa melihat sejarah bagaimana hubungan kedua negara lahir, sulit bagi kita untuk memahami mengapa keberadaan Mesir begitu 'penting' bagi politik luar negeri Indonesia.

1. Mesir sebagai Negara Pertama di Dunia yang Mengakui Kedaulatan Indonesia; Beban Sejarah Hubungan Diplomatik Indonesia terhadap Mesir

Menurut arsip yang ditemukan di Lembaga Arsip (*Dāru 'l-Watsāiq*) Mesir, pada hari Ahad, tanggal 1 Juni 1947 Kabinet Mesir di bawah pimpinan Perdana Menteri Mahmoud Fahmi Nokrasyi mengeluarkan keputusan pengakuan Pemerintah Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Keputusan itu diambil berdasarkan nota yang dikirim oleh

Kementerian Luar Negeri Mesir tanggal 22 Mei 1947 yang isinya permohonan persetujuan agar Mesir secara resmi mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Pengakuan Mesir atas kedaulatan Indonesia selanjutnya diikuti dengan penandatanganan perjanjian persahabatan pada tanggal 10 Juni 1947. Salah seorang delegasi Indonesia yang ikut menyusun naskah perjanjian dan menyaksikannya adalah Baswedan. Ia menceritakan peristiwa bersejarah itu sebagai berikut:

“ Sampai sekarang saya tidak bisa melupakan hari itu, tanggal 10 Juni 1947. Kami semua diantar Abdul Mun'im menuju ke gedung Kementerian Luar Negeri Mesir, sekitar jam 9 pagi, untuk menghadiri upacara penandatanganan perjanjian persahabatan Indonesia - Mesir...

Jam 9 pagi, kami sudah siap di ruang tunggu Kementerian Luar Negeri Mesir. Jabatan Menlu Mesir pada saat itu dirangkap oleh PM Nokrashi Pasha. Sesudah setengah jam menunggu, kami melihat Duta Besar Belanda (Pen: Graaf van Rechteren) keluar dari kamar PM Nokrashi dengan wajah yang kecut dan tergesa-gesa. Kami kemudian langsung dipersilakan masuk.

PM. Nokrasy Pasha meminta maaf karena telah membiarkan delegasi menunggu di luar. Menurut dia, Duta Besar Belanda itu langsung saja 'menyerbu' masuk ke ruang kerjanya untuk mengajukan protes sehubungan dengan perjanjian persahabatan Indonesia-Mesir. Duta besar itu mengingatkan Mesir tentang hubungan ekonomi Mesir dan Belanda serta janji dukungan Belanda terhadap Mesir dalam masalah Palestina di PBB.

Perdana Menteri kemudian menjawab, “menyesal sekali kami harus menolak protes tuan, sebab Mesir selaku negara berdaulat dan sebagai negara yang berdasarkan Islam tidak bisa tidak mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang beragama Islam. Ini adalah tradisi bangsa Mesir dan tidak dapat diabaikan. Begitulah jawabannya sehingga Duta Besar Belanda meninggalkan ruangan dengan kecewa.

Naskah perjanjian itu kemudian ditandatangani oleh PM. Nokrashi Pasha selaku Menlu Mesir dan Haji Agus Salim selaku Menteri Muda Luar Negeri RI. Disaksikan Dr. Nazir Sutan Pamuncak, sdr. Rasyidi, Abdul Mun'im, dan Sekjen Kemlu Mesir, Dr. Kamil serta saya sendiri.

Tidak dapat dibayangkan perasaan saya ketika menyaksikan upacara itu. Tak terlukiskan dalam kalimat karena tidak akan pernah dapat sebanding dengan rasa yang menggelora. Lega dan syukur kepada Allah, karena Republik Indonesia pada akhirnya mendapatkan pengakuan *de jure* dalam dunia internasional”.

Pengakuan Mesir atas kedaulatan Indonesia adalah tonggak sejarah yang tidak akan terlupakan oleh seluruh bangsa Indonesia, tanpa pengakuan, sebuah ‘negara’ tidaklah dikenal sebagai sebuah negara di forum internasional. Yang menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana Mesir, bisa memberikan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia? Padahal jika kita tilik dari letak geografis, Mesir adalah sebuah negara yang berada di kawasan Timur Tengah, sebuah kawasan yang sangat jauh secara geografis dari Indonesia.

Menjawab pertanyaan di atas, tentunya perlu untuk menarik sejarah lahirnya hubungan diplomatik kedua negara jauh ke belakang, dengan melihat kembali sejarah bagaimana dua bangsa ini saling berinteraksi, untuk kemudian saling berkontribusi bagi kemerdekaan Indonesia.

Menurut Azyumardi Azra (2005:xviii) Hubungan masyarakat Nusantara dengan Negara-negara di Timur Tengah telah ada sejak abad awal abad ke XVIII bahkan sebelumnya. Meskipun pada abad tersebut, mayoritas masyarakat Nusantara lebih memilih tanah suci (Makkah & Madinah) sebagai tujuan utama dalam menuntut ilmu keagamaan, dibandingkan dengan Negara-negara lain di Timur Tengah. Namun, di akhir abad ke XVIII, kontak antara murid-murid asal Nusantara dengan sejumlah guru, ulama bahkan rektor al-Azhar Kairo sudah mulai terjalin. Bahkan pada abad ke XIX, beberapa murid asal Nusantara sudah ada yang belajar dan menetap di Kairo untuk menuntut ilmu. Keberadaan mereka bisa dilihat dari keberadaan “*Ruwāq Jāwī*” di salah satu sudut Masjid al-Azhar (Abaza, 1999:31).

Kairo sebagai pusat keilmuan keislaman, ternyata tidak hanya mengajarkan kepada murid-murid asal Nusantara terkait materi keagamaan semata, namun ibu kota Mesir ini juga menawarkan pendidikan politik kepada mereka yang berhasrat untuk memperdalam pengetahuan seputar politik. Tidak heran jika kemudian terdapat slogan yang diucapkan oleh salah satu murid asal Nusantara “Di Mekah seseorang hanya dapat belajar agama, sedangkan di Kairo juga dapat belajar politik”. Kondisi inilah yang kemudian bisa dipahami, mengapa geliat politik masyarakat Nusantara di Kairo sangat tinggi. Tidak heran jika kemudian lahirnya pengakuan dunia atas kemerdekaan Indonesia berawal dari Mesir. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari peran aktif mahasiswa Nusantara dalam memperjuangkan

pengakuan kedaulatan Indonesia dari Mesir.

Mesir sebagai negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia, telah meletakkan posisi Mesir sebagai negara ‘penting’ dalam politik luar negeri Indonesia. Kondisi inilah yang peneliti maksud dengan ‘beban sejarah’ hubungan diplomatik antara Mesir dan Indonesia. Sebaliknya Mesir sendiri tidak memiliki beban sejarah apapun terhadap Indonesia, kondisi ini pulalah yang mempengaruhi sikap politik luar negeri Mesir terhadap Indonesia nantinya. Akhirnya dapat kita pahami, bahwa pondasi kelahiran hubungan diplomatik antara Indonesia dan Mesir tidaklah seimbang, sehingga wajar jika tercapainya ekuivalensi dalam hubungan diplomatik kedua negara pada masa-masa selanjutnya sulit tercapai.

2. Implementasi Politik Luar Negeri (Polugri) Indonesia dan Mesir

Setelah dibukanya kantor kedutaan Indonesia di Mesir pada tanggal 25 Februari 1950, politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir diarahkan sebagai politik ‘balas budi’ atau bayar hutang atas jasa-jasa Mesir selama revolusi (1945-1949).

Pemerintah Mesir menghubungi Indonesia untuk mendapatkan dukungan menentukan gelar Raja menjadi Raja Mesir dan Sudan (Antara, 2 Januari 1982). Setelah dibahas dalam Sidang Kabinet pada Senin pagi, 31 Desember 1951, Pemerintah Indonesia mengumumkan pengakuannya atas Raja Faruk sebagai Raja Mesir dan Sudan terhitung sejak hari itu juga. Menteri Penerangan Mononutu menjelaskan bahwa Kabinet telah mengambil keputusan soal pengakuan Raja Faruk (Berita Indonesia, 2/1/1952). Menteri Luar Negeri RI Subardjo kepada media massa Indonesia menjelaskan pengertian pengakuan Indonesia *explicitly* adalah “Kami Pemerintah Republik Indonesia menerima nota Pemerintah Mesir dan dengan ini menyatakan

pengakuan kami atas perubahan UUD Mesir mengenai perubahan tituluatur” (Antara, 2/1/1952).

Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan RI di Kairo, M. Zein Hassan menyampaikan surat pengakuan Indonesia itu secara resmi kepada Menteri Luar Negeri Mesir Ad Interim, Ibrahim Farag Pasha pada 5 Januari 1952. M. Zein Hassan menegaskan bahwa Indonesia tidak ragu-ragu untuk mengakui gelar Raja Mesir yang baru, karena Indonesia akan selalu mendukung perjuangan melawan penjajahan sebagaimana dulu Indonesia lakukan (Al-Ahram, 6/1/1952).

Selain balas budi, fokus utama pemerintahan Indonesia pada awal 1950-an dalam menjalankan politik luar negeri adalah untuk memperoleh dukungan internasional atas kemerdekaan Indonesia sekaligus melentakkan posisi Indonesia yang setara dengan negara-negara lain di dunia.

Dalam sambutannya, Perdana Menteri Indonesia Sastroamidjojo dalam acara 25 tahun Departemen Luar Negeri mengatakan:

“... karena kami percaya bahwa kerja sama antara negara-negara Asia Afrika akan memperkuat usaha-usaha untuk mencapai perdamaian dunia yang abadi, maka kami berpendapat bahwa kerja sama antara negara-negara tersebut mempunyai arti yang sangat penting..., (Sastroamidjojo, 1970:116)”.

Sambutan PM. Sastroamidjojo ini pulalah yang nantinya menjadi landasan kuat mengapa Soekarno memprakarsai terbentuknya KTT Asia Afrika bersama dengan presiden Mesir Gammal Abdul Nasser.

Selain memprakarsai KTT Asia-Afrika, implementasi Polugri Indonesia untuk memperoleh pengakuan negara-negara di dunia atas eksistensi Indonesia di lingkup Internasional adalah dengan mengirim pasukan untuk bergabung dengan *United Nations Emergency Force*

(UNEF). Pengiriman Pasukan PBB ini merupakan usaha pertama PBB dalam merumuskan suatu gagasan baru untuk menggantikan konsep keamanan kolektif yang telah gagal. Saat itu, Inggris dan Prancis bergabung dengan Israel memerangi Mesir. Karena Inggris dan Prancis memiliki hak veto, maka Dewan Keamanan tidak mampu berbuat apa-apa untuk mencegah konflik tersebut (Jones, 1993:392).

Kedekatan antara Presiden Soekarno dengan Nasser dalam berbagai kesempatan, sebenarnya tidak menjamin hubungan Indonesia-Mesir selalu sempurna. Dalam realitanya kemudian, pasang surutnya dinamika hubungan diplomatik tetap tidak dapat dihindari, meski dinamika tersebut tidak terlalu signifikan menciderai hubungan kedua negara. Contoh surutnya hubungan Indonesia Mesir dapat dilihat dari kekecewaan Pemerintah Indonesia terhadap sikap Mesir yang tidak berada di pihak Indonesia, pada saat berkonfrontasi dengan Malaysia. Pada saat itu, Indonesia menolak kehadiran Malaysia dalam KTT II Non-Blok di Kairo tahun 1964 dalam status apapun, namun Mesir tetap menerimanya sebagai peninjau.

Situasi di atas, jika ditilik dari kaca mata teori resiprositas, indikasi terjadinya ketimpangan dalam hubungan diplomatik Indonesia Mesir sebenarnya sudah mulai terlihat dan dapat dirasakan. Terlepas dari Polugri Indonesia pada awal-awal kemerdekaan yang lebih terlihat sebagai politik 'balas jasa' atas pengakuan kedaulatan Indonesia yang diberikan Mesir, yang digunakan pemerintah Indonesia sebagai tonggak pengakuan dunia kemudian, dengan selalu berada di sisi Mesir untuk berjuang bersama mencapai 'kepentingan nasional Mesir'. Tetapi di sisi lain, Mesir sebenarnya belum mampu memberikan timbal balik yang serupa. Dalam kasus konfrontasi Indonesia-Malaysia, menjadi contoh nyata, bagaimana ketimpangan sebenarnya sudah

ada. Bahkan pada masa awal-awal kemerdekaan Indonesia.

Kedekatan hubungan antara Indonesia dan Mesir juga belum tercapai secara maksimal saat Mesir dipimpin oleh Anwar Sadat. Kebijakan Anwar Sadat untuk berdamai dengan Israel ditentang oleh seluruh bangsa Arab. Bahkan Mesir sempat dikeluarkan dari Liga Arab dan dikucilkan dari OKI. Usaha Indonesia untuk membantu Mesir dalam melobi Negara-negara anggota OKI untuk tidak membekukan keanggotaan Mesir, juga gagal. Sehingga antara Indonesia dan Mesir belum menemukan momentum yang tepat dalam meningkatkan keeratan hubungan kedua Negara.

Politik luar negeri Indonesia pada masa kepemimpinan Soeharto juga peneliti anggap 'gagal' dalam meningkatkan kedekatan dua negara. Politik luar negeri Indonesia yang lebih fokus dalam peningkatan hubungan kerjasama dengan negara-negara di lingkup regional, yang bisa dilihat dari lahirnya organisasi ASEAN, menjadi landasan logis mengapa hubungan antara Indonesia dengan Mesir kurang tergarap dengan baik. Di lain waktu, fokus politik dalam negeri Indonesia adalah pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi dalam negeri. Hal inilah yang akhirnya meletakkan Indonesia terhubung 'lebih dekat' dengan negara-negara Barat, tujuannya adalah untuk mendapatkan modal pinjaman lunak bagi pembangunan Indonesia. Sesuatu 'kepentingan nasional' Indonesia yang sulit diberikan oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah pada waktu itu, terlebih Mesir.

3. Ketimpangan Hubungan Indonesia-Mesir

Selain pelaksanaan politik dalam dan luar negeri kedua Negara, yang menyumbang dan membuktikan adanya ketimpangan dalam hubungan Indonesia Mesir. Peneliti juga menemukan dua aspek lain yang membuktikan adanya ketimpangan dalam hubungan dua negara.

Pertama kuantitas formasi perwakilan dan yang kedua intensitas kunjungan pejabat negara. Jika Indonesia menempatkan banyak diplomat di KBRI Kairo, berbeda halnya dengan Mesir, yang hanya menempatkan beberapa diplomat di Kedutaan Mesir untuk Indonesia. Jika pada tahun 2010, struktur KBRI Kairo terdiri dari Kepala Perwakilan, Wakil Kepala Perwakilan, Fungsi Politik, Fungsi Ekonomi, Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya, Fungsi Protokol dan Konsuler, Atase Pertahanan, Atase Perdagangan, Atase Pendidikan Nasional, Unit Komunikasi, Bendahara dan Penata Kerumahtanggaan, serta Kepala Sekolah Indonesia Kairo (SIC). Sehingga jumlah pejabat diplomatik (*home staff*) di KBRI Kairo mencapai 18 orang dan didukung oleh 37 pegawai setempat (*local staff*). Sementara itu, Kedutaan Mesir di Jakarta pada tahun 2010 hanya terdiri dari Kepala Perwakilan, Wakil Kepala Perwakilan, Atase Perdagangan, Administrasi dan Keuangan. Sehingga jumlah pejabat diplomatik (*home staff*) Kedutaan Mesir di Jakarta hanya mencapai 10 orang, ditambah dengan beberapa pegawai setempat (*local staff*).

Jumlah pejabat diplomatik yang dikirim suatu negara ke negara lain, sesungguhnya mampu menunjukkan besar atau kecilnya kepentingan Negara pengirim ke Negara tujuan. Indonesia menempatkan banyak pejabat diplomatik di Mesir, menunjukkan besarnya kepentingan Indonesia terhadap Mesir. Sebaliknya minimnya jumlah pejabat Mesir yang bertugas di kedutaan Mesir untuk Indonesia, bisa dipahami sebagai minimnya kepentingan Mesir terhadap Indonesia.

Sebagaimana pendapat pakar hukum internasional yang juga diplomat, Boer Mauna (2001: 485-488), pada dasarnya besarnya staf perwakilan bergantung kepada:

1. Volume pekerjaan dan tingkat intensitas hubungan kedua negara.

2. Faktor kesanggupan negara pengirim (dana dan personil).
3. Pentingnya negara penerima di mata negara pengirim.

Alasan pertama dan ketiga sangat relevan untuk menjawab pertanyaan kenapa besar komposisi KBRI Kairo dan kenapa kecil komposisi Kedutaan Mesir di Jakarta. Tentu tidak logis jika alasan kecilnya komposisi Kedutaan Mesir di Jakarta dikarenakan kekurangan finansial atau karena kekurangan personil.

Kedua, frekuensi kunjungan kepala negara dan pejabat-pejabat lain, juga bisa digunakan sebagai indikator keharmonisan kerjasama antar dua negara. Jika dalam kurun waktu 1955 sampai dengan 1965 Presiden Soekarno telah berkunjung ke Mesir sebanyak 6 kali. Namun sebaliknya, Perdana Menteri/Presiden Gamal Abdel Nasser hanya singgah satu kali di Indonesia. Kedatangannya pun dalam rangka menghadiri Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tanggal 16-27 April 1955 (Kompas, 26/08/1997: 22).

Setelah itu, Presiden Soeharto, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono selalu melakukan kunjungan ke Mesir. Hanya Presiden Habibie yang tidak sempat berkunjung ke Mesir karena singkatnya masa jabatannya dan situasi dalam negeri yang belum stabil pasca-pergantian kepemimpinan nasional. Sedangkan Presiden Anwar Sadat sama sekali tidak pernah berkunjung ke Indonesia. Presiden Hosni Mubarak pun selama masa jabatannya hanya pernah sekali datang ke Indonesia pada tanggal 9-11 April 1983.

Selain bidang politik, ketimpangan hubungan antara Indonesia dan Mesir juga terlihat di bidang ekonomi. Bagi Indonesia, Mesir adalah negara potensial tujuan pasar Indonesia. Data yang peneliti dapat dari Atase Perdagangan KBRI di Mesir dalam kerjasama ekonomi, peningkatan volume perdagangan yang pada tahun 2006 mencapai angka tertinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya, yaitu sebesar US\$ 363,93 juta dengan nilai surplus US\$ 315,90 juta untuk Indonesia. Sedangkan untuk tahun 2007, dari Januari hingga bulan Oktober, tercatat US\$ 224,03 juta dengan surplus untuk Indonesia sebesar US\$ 204,55 juta. Angka tersebut menunjukkan bagaimana gap keuntungan (surplus) Indonesia jika dibandingkan dengan Mesir sangatlah besar. Untuk lebih jelasnya, berikut data lengkap data sirkulasi keuntungan kerjasama ekonomi Indonesia Mesir dari

terkait faktor-faktor penyebab ketimpangan hubungan kedua Negara.

1) Tingginya rasa kepercayaan diri Mesir.

Timbulnya rasa kepercayaan diri bangsa Mesir yang tinggi tentunya bukan tanpa alasan, perjalanan panjang sejarah bangsa Mesir yang fenomenal adalah satu dari berbagai alasan mengapa mereka berbangga hati. Piramida yang fenomenal dan beberapa peninggalan kerajaan Mesir kuno saat ini masih bisa kita saksikan. Kondisi ini pulalah yang menjadikan Negara Mesir dikenal seantero dunia, tidak

Tahun	Total	Ekspor RI	Impor RI	Surplus RI
2000	150.441.284	143.717.444	6.723.840	136.993.604
2001	167.459.807	158.478.667	8.981.140	149.497.527
2002	148.538.090	132.813.110	15.724.980	117.088.130
2003	145.627.066	108.155.387	37.471.679	70.683.708
2004	181.933.898	161.377.260	20.556.638	140.820.622
2005	201.850.363	182.794.754	19.055.609	163.739.145
2006	363.931.416	339.916.427	24.014.989	315.901.438
2007	254.531.039	241.966.905	12.564.134	229.402.771

tahun 2000 sampai dengan 2007:

Dari sini dapat kita mengerti, mengapa pemerintah Indonesia melihat Mesir sebagai negara yang potensial bagi peningkatan *income* perdagangan Indonesia, sebaliknya Mesir sendiri belum mendapatkan keuntungan yang maksimal. Terlebih, Indonesia memandang Mesir sebagai pintu gerbang bagi masuknya barang Indonesia ke wilayah Afrika dan Maghribi.

4. Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Hubungan Indonesia-Mesir

Terjadinya ketimpangan dalam hubungan Indonesia dan Mesir, tentunya bukan tanpa sebab, berikut analisa peneliti

terkecuali oleh masyarakat Indonesia. Presiden Soeharto pada acara jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Presiden Anwar Sadat saat kunjungan kenegaraan ke Mesir tanggal 16-18 Oktober 1977 menyatakan:

“Bagi berjuta-juta rakyat Indonesia, Mesir tidak terasa asing. Sejak Sekolah Dasar anak-anak Indonesia telah mengenal nama Sungai Nil yang terkenal itu, mereka juga mengenal dan mengagumi piramida-piramida di bumi ini yang sangat mashur... Universitas Al Azhar sangat dikenal oleh kami dan tidak sedikit pemuda Muslim menimba ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan lain dari Universitas

yang mashur itu (Al-Ahram, 18 Oktober 1977).”

Selain sejarah gemilang bangsa kuno Mesir yang menjadikan masyarakat mereka berbangga diri, Mesir juga merupakan negara yang banyak sekali disebutkan dalam tiga kitab suci agama: Islam, Yahudi dan Kristen. Tidak hanya disebutkan di dalamnya, melainkan juga karena terdapat banyak kisah, pelajaran dan daya tarik tersendiri dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dalam agama Islam, Mesir merupakan negara yang paling banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Mesir disebutkan sebanyak lebih dari 35 kali; lima kali secara *sharih* (jelas) menggunakan kata “Mashr”, dan sisanya secara *kinayah*, baik dengan menggunakan kata “*al-ardh*” (bumi) atau “*al-madinah*” (kota), yang maksudnya adalah kota atau negeri Mesir.

2) Superioritas *image* al-Azhar sebagai pusat ilmu pengetahuan Islam.

Al-Azhar adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang menjadi kebanggaan umat Islam di seluruh dunia. Kebanggaan umat tersebut bukan hanya karena usia Al-Azhar yang sudah mencapai lebih seribu tahun dan mampu terus bertahan hingga hari ini, tetapi juga karena peranan besar yang telah diemban lembaga ini dalam mendidik kader umat, sehingga mampu melahirkan para ulama, kyai, ustadz atau cendekiawan. Oleh karena itu, hampir setiap orang tua mencita-citakan agar anaknya dapat mengenyam pendidikan di Al-Azhar dan dapat menikmati siraman ilmu dari para alim ulama shalih serta *tawadhu`* di perguruan tinggi tersebut. Sebagaimana peneliti sampaikan saat diwawancarai oleh Shout Al-Azhar:

“... Al-Azhar dari dulu sampai sekarang adalah kiblat ilmu pengetahuan Islam. Setelah para mahasiswa Indonesia menamatkan pendidikannya di Al-Azhar, mereka pulang ke Tanah Air. Mereka memainkan

peran penting di tengah-tengah masyarakat dengan menyebarkan Islam yang moderat dan toleran... Terus terang, Indonesia berutang banyak kepada Mesir dan Al-Azhar. Berapa banyak putra-putri Indonesia yang setelah lulus kuliah, mereka menjadi pemimpin dan terlibat dalam pembangunan Indonesia” (*Shout Al-Azhar*, 28 Mei 2010).

3) Tingginya kuantitas mahasiswa Indonesia yang belajar di al-Azhar.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di dunia, peranan Al-Azhar dalam mendidik kader umat seluruh dunia tidak dapat diragukan lagi. Hal ini sangat dirasakan oleh umat Islam di Indonesia. Dalam sejarah perjalanan RI, peranan alumni Al-Azhar sungguh sangat signifikan, baik dalam tataran keilmuan maupun dukungan politik praktis menjelang dan awal kemerdekaan RI. Sebagaimana disebutkan di atas, Kahar Mudzakir adalah salah satu alumni Al-Azhar yang peranannya sangat besar dalam menentukan arah RI yang ketika itu baru merdeka. Ia adalah salah satu penandatangan Piagam Jakarta yang merupakan salah satu dokumen terpenting dalam sejarah nasional RI. Masih banyak lagi alumni Al-Azhar lainnya yang berkiprah secara nyata dalam memajukan dan mendidik rakyat Indonesia.

Proses ini tidak pernah berhenti, sehingga dari tahun ke tahun jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Al-Azhar sangat meningkat, bahkan pada tahun akademik 2004/2005 saja, mahasiswa baru Al-Azhar asal Indonesia mencapai 1.100 orang. Oleh sebab itu, sangat wajar jika saat ini mahasiswa Indonesia di Al-Azhar mencapai sekitar 5000 orang (terbesar kedua setelah Malaysia yang mencapai 8000 orang). Selain itu, setiap tahun ratusan alumni S-1 Al-Azhar diwisuda dan pulang ke tanah air untuk mengabdikan diri pada bangsa.

4) Besarnya hutang budi masyarakat Nusantara kepada al-Azhar.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, menjadikan Indonesia sebagai contoh bagi negara-negara muslim lain dalam mengatur masyarakat muslimnya secara khusus dan masyarakat non-muslim lainnya. Stigma negatif yang muncul dari Barat bahwa Islam adalah agama yang membolehkan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan adalah sesuatu yang perlu diluruskan. Bahkan terminologi terorisme yang sempat dikaitkan dengan Islam adalah sesuatu yang perlu dihapuskan. Cara yang paling relevan untuk menghapuskan stigma negatif tersebut adalah mengenalkan Islam sebagai agama yang moderat. Misi al-Azhar mengenalkan Islam moderat akhirnya menarik minat masyarakat Indonesia untuk menimba ilmu di al-Azhar. Situasi inilah yang menjadikan masyarakat Nusantara berhutang kepada al-Azhar, bukan hanya sekarang, tapi bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia.

Jika kita perhatikan beberapa misi utama serta aktivitas yang dilakukan Al-Azhar, maka kita akan dapat menyimpulkan beberapa peran besar Al-Azhar bagi umat Islam. Peran tersebut mencakup berbagai bidang kehidupan, terutama keagamaan, pendidikan, politik, ekonomi dan budaya. Peran tersebut bukan hanya dirasakan oleh umat Islam di Mesir, melainkan dirasakan pula oleh umat Islam di seluruh dunia. Hal ini dibuktikan dengan eksistensinya Al-Azhar sampai seribu tahun lebih. Selain itu, hal tersebut menandakan bahwa peranan Al-Azhar sangat diterima oleh umat Islam, sehingga mereka sangat merasakan dan membutuhkan kehadiran Al-Azhar dalam kehidupan mereka. Di sini akan diulas secara singkat beberapa peranan penting yang telah dilakukan oleh Al-Azhar dalam mendidik dan memperjuangkan kepentingan umat, terutama dalam mengembangkan ilmu-ilmu keislaman.

Di atas telah disebutkan, bahwa pada tahun 1961 pemerintah Mesir mengeluarkan UU nomor 103 tahun 1961 tentang: reorganisasi lembaga-lembaga di bawah Al-Azhar. UU tersebut merupakan penyempurnaan UU sebelumnya dalam rangka mengembangkan dan memperbaharui sistem pendidikan Al-Azhar. Pada pasal 2 UU tersebut disebutkan, bahwa misi dan peranan utama Al-Azhar adalah sebagai berikut:

"Al-Azhar adalah sebuah lembaga keilmuan Islam terbesar yang tugas utamanya adalah menjaga dan memelihara warisan intelektual Islam (turats), mengajarkannya, mengkajinya dan menyebarkanluaskannya serta mengemban misi amanah Islam kepada seluruh bangsa, bekerja keras untuk menjelaskan hakikat Islam dan pengaruhnya dalam memajukan kehidupan dan peradaban manusia, menjamin rasa aman dan nyaman bagi seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Azhar juga mengemban tugas membangkitkan peradaban Arab serta warisan intelektual bangsa Arab dan sumbangsihnya bagi peradaban kemanusiaan. Ia juga bertugas mempertinggi nilai etika dan estetika serta memajukan seluruh bidang ilmu pengetahuan, melayani masyarakat serta tujuan nasioanal dan kemanusiaan serta nilai-nilai ruhiyah lainnya. Al-Azhar juga bertugas menambah kualitas dan kuantitas intelektual muslim di seluruh dunia, terutama di negara-negara Islam dan Arab, yang memiliki pemahaman mendalam mengenai ilmu-ilmu syari'ah, peradaban Islam dan Arab serta bahasa Al-Quran. Ia juga bertugas melahirkan para ulama yang memiliki kedalaman ilmu dan mengamalkannya serta

memiliki keimanan kepada Allah dan rasa percaya diri, memiliki kekuatan ruhani untuk menggabungkan antara agama dengan kehidupan duniawi serta menghubungkan antara aqidah dan perilaku keseharian. Selain itu, Al-Azhar juga bertugas memberikan keterampilan kepada para ahli agama agar dapat berpartisipasi dalam kepemimpinan sebagai teladan yang baik, serta memberikan keterampilan kepada para ilmuwan umum untuk ikut serta dalam proses berdakwah ke jalan Allah dengan cara yang bijak dan nasihat yang baik. Al-Azhar juga memiliki komintmen dan konsentrasi pada upaya penguatan kerjasama di bidang intelektual dan budaya dengan perguruan tinggi atau lembaga lain, baik di negara-negara Islam maupun negara asing lainnya."

Pasal di atas mempertegas visi misi serta peran Al-Azhar dalam masyarakat terutama dalam mengembangkan ilmu-ilmu keagamaan, dimana salah satu tugas utamanya adalah menjaga dan memelihara warisan intelektual Islam (*turats*), mengajarkannya, mengkajinya dan menyebarkannya. Melalui pemeliharaan warisan intelektual inilah Al-Azhar berusaha menjadi lembaga yang konsisten terhadap kajian keislaman tradisional dengan terbuka terhadap hal-hal baru. Oleh sebab itu, sebagian besar kurikulum di fakultas agama diarahkan kepada penguasaan ilmu-ilmu keislaman tradisional. Upaya tersebut diikuti dengan berbagai program pendukung. Dengan demikian, sampai saat ini perhatian terhadap kajian ilmu-ilmu keislaman tradisional menjadi *trade mark* Al-Azhar sepanjang sejarah.

Selain itu, peran penting yang dilakukan Al-Azhar adalah ketika Al-Azhar memprakarsai program dialog antar

madzhab Islam (*At-Taqrib Bainal Madzâhib al-Islâmiyyah*) terutama dialog Sunni-Syi'ah serta dialog antar agama-agama samawi (*al-Hiwâr Bainal Adyân al-Samâwiyyah*). Situasi ini semakin dirasa penting bagi masyarakat Indonesia secara khusus, terlebih saat ini Indonesia mulai 'terancam' isu-isu perpecahan dan konflik disebabkan faham-faham keIslaman yang berbeda-beda tersebut.

5. Usaha-Usaha Untuk Memperbaiki Hubungan Indonesia-Mesir

Terjadinya ketimpangan dalam hubungan kedua Negara, yang peneliti rasakan saat ini bukanlah sebuah masalah yang tidak bisa terselesaikan. Optimisme peneliti bahwa permasalahan ini pada suatu waktu dapat dinetralisir, bahkan hubungan kedua negara pada saatnya nanti dapat mencapai tingkat maksimal. Untuk alasan inilah, berikut beberapa solusi yang peneliti tawarkan kepada pemerintah ataupun masyarakat Indonesia yang tergerak hatinya untuk kembali memperbaiki hubungan kedua negara. Solusi tersebut berupa: (1) Menciptakan sinergi harmonis di antara stakeholders, (2) Meningkatkan kualitas diplomat Indonesia, terlebih yang akan ditugaskan di Mesir, (3) Lebih menggalakkan kembali Diplomasi Publik, (4) Mendorong urgensi peran mahasiswa sebagai duta bangsa, (5) Memperbanyak publikasi tentang Indonesia melalui media buku, (6) Rutin memperingati dan merayakan hubungan persahabatan kedua negara, (7) Menggencarkan promosi pariwisata Indonesia, (8) Meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia bagi Masyarakat Mesir, (9) Meningkatkan kejasama seni budaya dan olah raga dua negara, dan yang terakhir (10) Menarik minat pemuda Mesir untuk belajar/kuliah di Indonesia.

D. Penutup

Tentunya penelitian ini bukanlah kesimpulan akhir dari sebuah proses diplomatik hubungan bilateral dua negara, namun bisa menjadi bahan diskusi

sekaligus kontemplasi bagi penyelenggara Negara yang bertugas meningkatkan mutu dan kualitas diplomasi Indonesia di tingkat internasional, sehingga cita-cita luhur pendiri bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sekaligus dapat terealisasi dengan segera. Semoga penelitian ini bermanfaat! *Wallahu'Alam.*

Daftar Pustaka

- Abegebriel, A. Maftuh, dkk. 2004. dalam Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia. Yogyakarta: SR-Ins Publishing.
- , 2004: "Ada apa dengan dokumen JI". dalam Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia. Yogyakarta: SR-Ins Publishing.
- Abdul Aziz, Jum'ah Amin. 2005. *Aurāq min Tārīkhi 'l-Ikhwāni 'l-Muslimūn: Dhurūfu 'n-Nasy'ah wa Syakhshiyati 'l-Imāmi 'l-Mu'assis.* (diterjemahkan oleh Bobby Herwibowo dengan judul: Masa Pertumbuhan dan Profil Sang Pendiri: Imam Syahid Hasan Al-Banna, Solo: Intermedia.
- Azra, Azyumardi, 1996. *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post-Modernisme,* Jakarta: Penerbit Paramadina.
- Choueiri, Youssef M.1990. *Islam Garis Keras: Melacak Gerakan Fundamentalisme.* Yogyakarta: Qonun.
- , 2003. "Islam and Fundamentalism" dalam Roger Eatwell dan Anthony Wright (eds.) "Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer", versi Indonesia (Jakarta: MediaTOR.
- Dekmejian, R. Hrair, 1997. "Multiple Faces of Islam" dalam Anders Jerichow dan Jørgen Bæk Simonsen (ed.), *Islam in a Changing World: Europe and The Middle East, Great Britain: Curzon Press.*
- Dijk, Cornelis van, 1983. *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan.* (Terj. Grafiti Pers). Judul asli: *The Rebellion Under the Banner of Islam,* diterbitkan oleh KITLV. Jakarta: Grafiti Pers.
- Eickelman, Dale F. dan Piscatori, James. 1998. *Ekspresi Politik Muslim.* Jakarta: Mizan.
- Hornby, AS et.al. 1987. *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English (revised and updated),* New York, Toronto: Oxford University Press.
- Husain, Mir Zohair, 1997. "The Ideologization of Islam: meaning, manifestations and causes" dalam Anders Jerichow dan Jørgen Bæk Simonsen (ed.), *Islam in Changing World: Europe and Middle East, Great Britain: Curzon Press.*
- Kartodirdjo, Sartono, 1984. "Pemberontakan Petani Banten 1988". Pustaka Jaya. Jakarta
- , 1985, Ratu Adil. Jakarta: Sinar Harapan.
- , 1997. "Metode Penggunaan Bahan Dokumen" dalam Koentjaraningrat, 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat, 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Loqman, Loebby. 1990. *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia,* (Jakarta: Universitas Indonesia)
- Mandzur, Ibnu Abul-Fadhl Muhammad. 1990. *Lisānu 'l-'Arab.* Beirut: Dar Shadir.

- Mulyana W. Kusumah, 2002. Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III
- Morris, William, 1973. The American Heritage Dictionary of English Language, Boston: Houghton Mifflin Co.
- Ngatawi, 2002. Radikalisasi Gerakan Islam Simbolik FPI (Tesis Ilmu Sosial dan Politik). Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Poerbatjaraka, R.M.Ng, 1957. Kapustakan Djawi. Djakarta: Djambatan.
- Rais, M. Amin, 1990. "Gerakan-gerakan Islam Internasional dan Pengaruhnya bagi Gerakan Islam Indonesia" dalam Percikan Pemikiran Fisipol UGM tentang Pembangunan, Yogyakarta: Fisipol UGM.
-, 1990. Timur Tengah dan Krisis Teluk: Sebuah Analisa Kritis. Surabaya: Amarpress.
- Ramly, Andi Muawiyah, dkk. 2006. Demi Ayat Tuhan: Upaya KPPSI Menegakkan Syariat Islam. Jakarta: Opsi (Open Society Institute).
- Roy, Oliver . 1996. Gagalnya Politik Islam. (edisi dalam bahasa Prancis berjudul: L'échec de l'islam politique, Edition du Seuil, 1992; dan edisi berbahasa Inggris berjudul The Failure of the Political Islam, Harvard University Press, cet. 1. Jakarta: Serambi.
- Suwarno, Peter. 2005. Resolving Religious Conflicts Through Expanding Inter-Religious Communication: Issues and Challenges, Jurnal Al Jami'ah, Vol 43, No 2, 2005/1426 H
- Syarkun, Mukhlas dan Ghorara, W. 2004. "Dunia Islam dalam Benturan Kepentingan dan Peradaban", dalam Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia, Yogyakarta: SR-Ins Publishing.
- Watt, William Montgomery, 1969. Muhammad, Prophet and Statesman, Oxford: Oxford University Press.
- Wijaya, M.Yusuf, 2001. "Visi-visi Pemikiran Keislaman: Upaya Klasifikasi Pemikiran Keislaman Timur Tengah" dalam Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah. Editor M. Aunul Abied Shah et.al. Bandung: Mizan.
- Yunanto S. dkk. 2003. Gerakan Militan Islam: di Indonesia dan di Asia Tenggara. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) dan The Ridep Institute.